BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Objek Penelitian

4.1.1.2 Gambaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya bernama Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (distanbunhut) Kabupaten Bandung Barat yang dibentuk pada tahun 2008, Ir. Ida Nurhamida, M.Si sebagai Kepala Dinas. Tahun 2017 mengalami perubahan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) dengan Kepala Dinas yang sama pada sebelumnya, perubahan literatur tersebut tidak berdampak pada perubahan tugas dan fungsi pokok dari Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) tersebut.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomo 36 Tahun 2017 Tentang Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, dijelaskan pada BAB II Pasal 3 sebagai berikut:

1. DPKP dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, UPT dan jabatan fungsional;
b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
c. pembinanan pelaksanaan tugas Dinas.

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, UPT dan jabatan fungsional;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
e. memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, tanaman pangan, perkebunan, ketahanan pangan, UPT dan jabatan fungsional;
f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan;

g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;dan
i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala DPKP Kabupaten Bandung Barat, membawahkan;

a. Sekretariat.
b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program.
c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
d. Kepala Seub Bagian Kepegawaian dan Umum
e. Kelompok Jabatan Fungsional
f. Kepala Bidang Tanaman Pangan
g. Kepala Bidang Holtikultura.
h. Kepala Bidang Perkebunan
i. Kepala Bidang Ketahanan Pangan

4.1.1.3 Gambaran Desa Pasirlangu

Desa Pasirlangu adalah sebuah Desa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya berada tidak jauh dari kaki Gunung Burangrang. Desa Pasirlangu memiliki 9.924 jumlah penduduk yang terdiri dari 13 rukun warga, 61 rukun tetangga, dan 10 kelompok tani. Penduduk desa ini menggantungkan

hidupnya pada pertanian. Berikut tabel masyarakat Desa Pasirlangu menurut mata pencahariannya.

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pasirlangu

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki(orang)	Perempuan(orang)
1.	Petani	3.987	638
2	Buruh Tani	657	186
3	Buruh Migran	3	4
4	Pengusaha kkecil, menengah, dan besar	33	0
5	Pedagang Keliling	18	3
6	Pegawai Negeri Sipil	9	14
7	Pengrajin	5	1
8	Peternak	2	0
9	Montir	10	0
10	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	0

(Sumber : Desa Pasirlangu, 2018)

Berdasarkan tabel mata pencaharian masyarakat Desa Pasirlangu diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat Desa Pasirlangu mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai seorang petani. Komoditas pertanian yang ada di Desa ini antara lain: bunga potong, sayur mayur, waluh (lejet) dan cabai paprika. Komoditas pertanian tersebut menjadi sumber perekonomian utama di Desa Pasirlangu karena tingkat harga jual yang tinggi dibandingkan sayuran lain. Desa Pasirlangu letaknya sedikit terpencil, namun perekonomian di Desa Pasirlangu belum dapat dikatakan maju. Berikut uraian petani berdasarkan jenis tanaman di Desa Pasirlangu:

Tabel 4.2
Data Luas Lahan Petani Desa Pasirlangu

No	Nama Sayuran	Luas Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (Ha)	Luas Panen (Ha)		Luas Penanaman Baru/Tambah (Ha)	Luas Tanaman Akhir Bulan	Produk (kwintal)		Harga Jual Petani PerKilogram
			Habis/Dibongkar	Belum Habis			Dipanen/Habis Dibongkar	Belum Habis	
1	Waluh	146	29	49	32	149	4.300	15.400	Rp. 4.000
2	Jamur	135	20	35	-	1301	1.550	6.000	Rp.12.000
3	Cabai Paprika	22	3	25	-	19	996	1.560	Rp. 30.000
4	Tomat	20	5	19	3	18	1.250	1.000	Rp. 5.000
5	Buncis	15	6	5	8	17	690	400	Rp. 7.000

(Sumber: Desa Pasirlangu, 2018)

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa Petani Waluh di Desa Pasirlangu merupakan salah satu komoditas petani memiliki luas lahan yang lebih luas dari komoditas petani lainnya, namu tidak menutup kemungkinan bahwa kesejahteraan petani waluh kurang terpandang, dengan adanya komoditi lainnya. Minimumnya pemberian bantuan maupun penyuluhan yang dirasakan petani waluh, hal tersebut yang membuat petani waluh memiliki permasalahan baik dalam hal tanaman pangan maupun dalam hal pengolahan dan pemasaran.

Pendapatan hasil panen terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran, hal tersebut diakibatkan oleh hasil panen yang tidak terjual habis, dan kegagalan panen yang diakibatkan oleh serangan hama yang tidak teratasi dengan baik. Keuntungan yang didapatkan petani menurun , terkadang kurang untuk dijadikan modal tanam kembali.

4.1.1.4 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat

Visi dari DPKP Kabupaten Bandung Barat “Terwujudnya Pertanian Tangguh Berbasis Potensi Wilayah."

1. Pertanian : Seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Tangguh : Kondisi pertanian yang produktif berdaya saing, mandiri dan inovatif mampu mengantisipasi hambatan, tantangan untuk kemajuan pertanian.
3. Potensi Wilayah : Merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan, serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik, meliputi : Tumbuhnya ekonomi; Terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan; Berkembangnya kehidupan sosial budaya yang konstruktif; Tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai; Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Misi dari DPKP Kabupaten Bandung Barat yaitu :

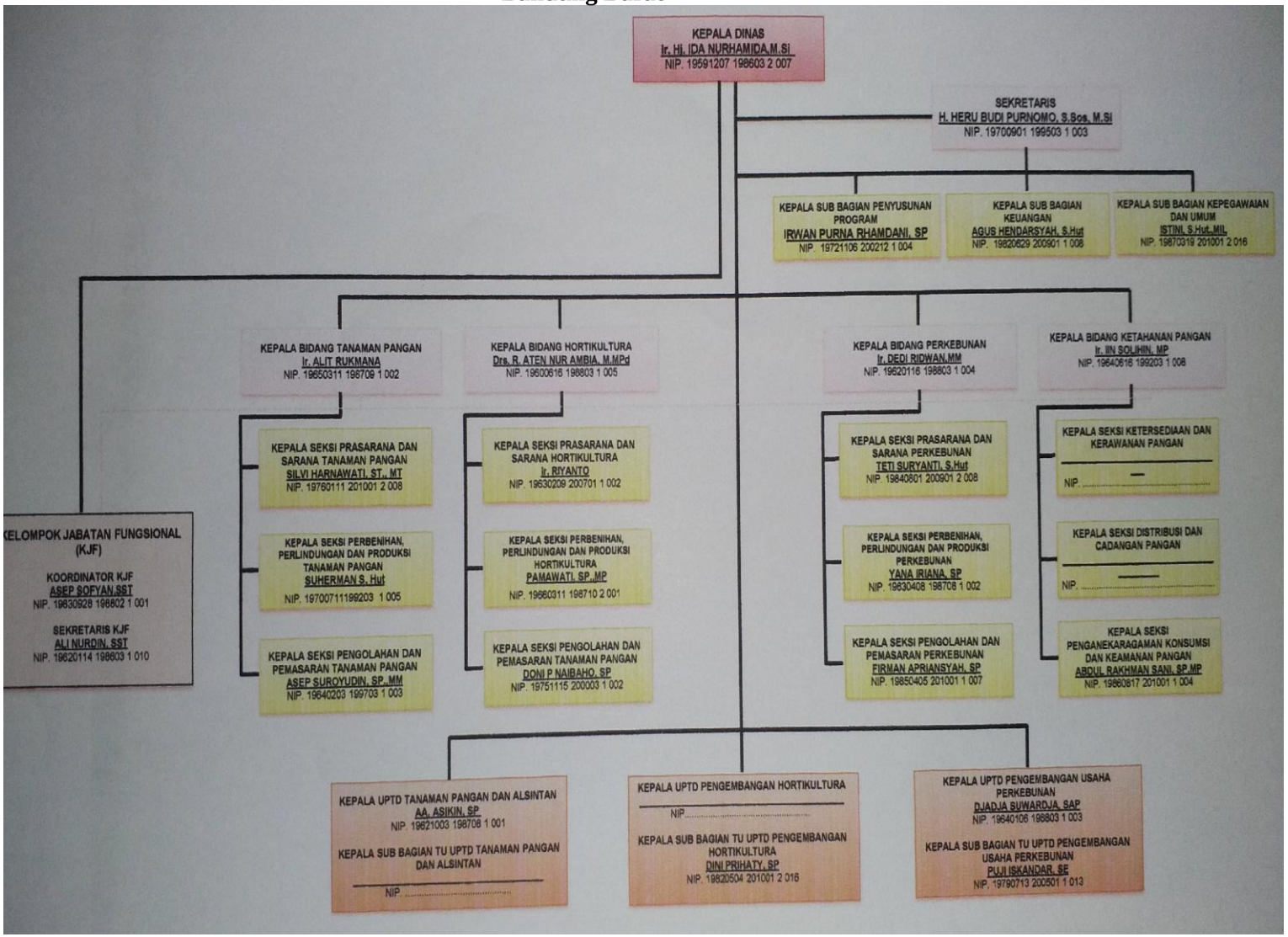
1. Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu Hasil Pertanian dalam rangka Swasembada berkelanjutan dan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Petani.
3. Memantapkan Kelestarian Hutan dan Daya Dukung Lingkungan.

Visi dan Misi dari DPKP Kabupaten Bandung Barat di atas adalah sebagai acuan bagi seluruh aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pertanian tangguh pada umumnya dan kesejahteraan petani khususnya untuk meningkatkan kinerja aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat itu sendiri

4.1.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat

Struktur organisasi merupakan suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan, dan selain itu struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisah kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya, dan bagaiaman hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggungjawab kepada siapa, yang kemudian terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat



(Sumber: Data DPKP Kabupaten Bandung Barat, 2018)

Berdasarkan gambar 4.1 tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh termasuk kedalam Bidang Hortikulutura yang yang terdapat Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura, Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura dan Kepala Seksi Pengolahan Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan. Sub Bidang tersebut dikelola dan diawasi oleh Kepala Bidang Hortikultura. Menurut peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Hortikultura menyelenggarakan tugas:

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Prasarana dan Sarana Hortikultura, Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura serta Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan

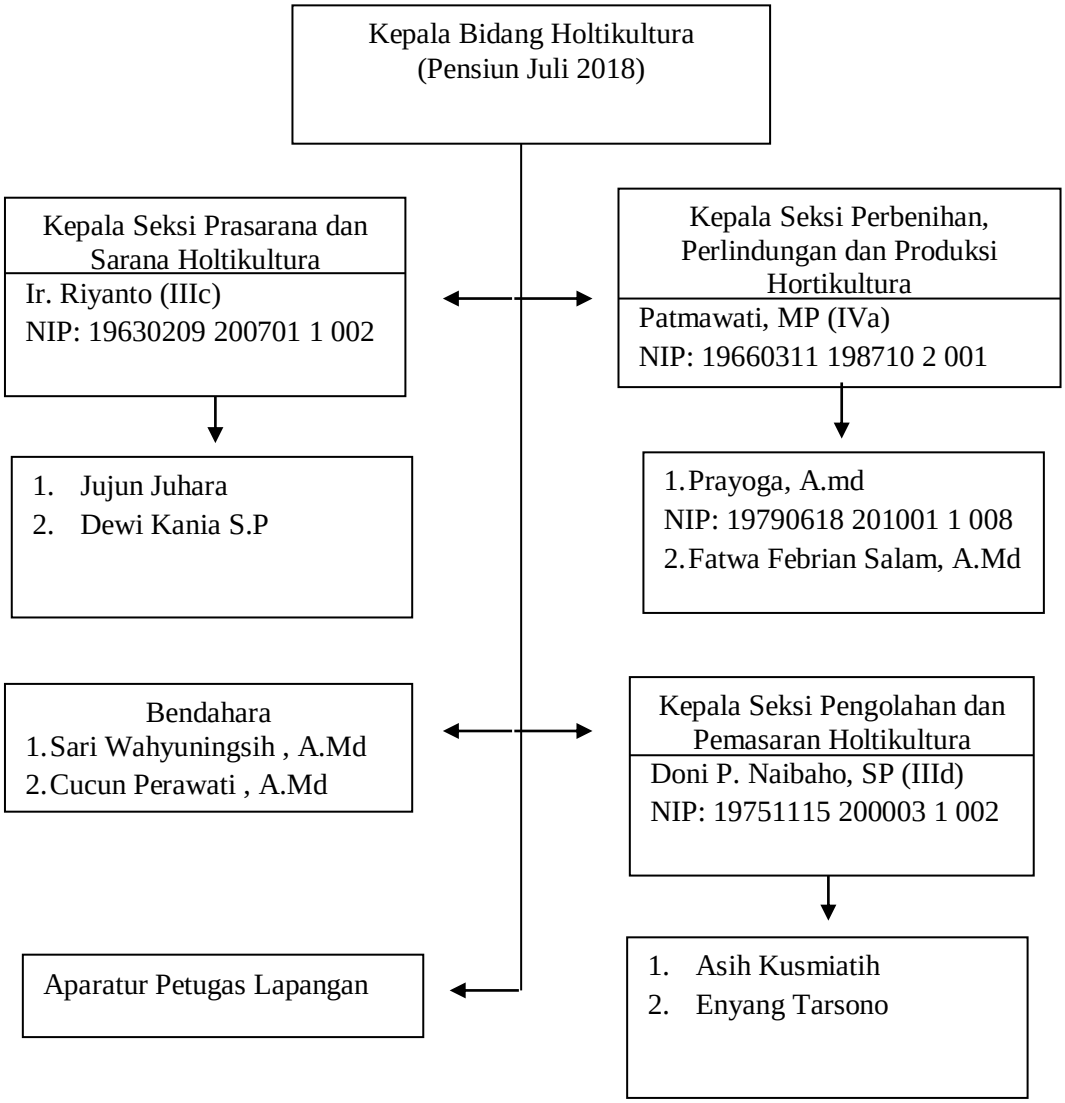
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura.

Bidang Hortikultura mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Hortikultura;
b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;

g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang prasarana dan sarana hortikultura, perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hortikultura;
k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanan tugas;
m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.3
Struktur Organisasi Bidang Holtikultura



(Sumber: Bidang Holtikultura, 2018)

Berdasarkan tabel diatas bahwa kepala bidang holtikultura membawahi kepala seksi prasarana dan sarana holtikultura, kepala seksi perbenihan, perlindungan dan produksi holtikultura, kepala seksi pengolahan dan pemasaran

holtikultura, Staf Bendahara dan Aparatur Petugas Lapangan. Berikut adalah tugas dari setiap kepala seksi bidang holtikultura :

4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Holtikultura DPKP Kabupaten Bandung Barat

Tugas pokok dan fungsi merupakan sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi maupun aparatur untuk dicapai dan dilakukan, berikut uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Holtikultura:

1. **Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura**

a. Seksi Prasarana dan sarana Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang prasarana dan sarana Hortikultura.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana Hortikultura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang prasarana dan sarana hortikultura;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang prasarana dan sarana hortikultura; dan
c. pelaksanaan tugas teknis di bidang prasarana dan sarana hortikultura.

2. Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura

a. Seksi perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perbenihan, perlindungan dan produksi hortikultura.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan, Perlindungan dan Produksi Hortikultura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang hortikultura;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang hortikultura; dan
c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sarana dan prasarana di bidang hortikultura.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

a. Seksi pengolahan dan pemasaran hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran hortikultura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura;

b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura; dan
c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hortikultura.

4. Bendahara

a. Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan denga tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara umum holtikultura mempunyai fungsi:

a. Mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterima
b. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya.
c. Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal.
d. Membuat pertanggungjawaban berupa Lapoarn pertanggungjawaban (LPJ)

5. Aparatur Petugas Lapangan

a. Aparatur petugas lapangan melaksanakan kegiatan persiapan meliputi, identifikasi potensi wilayah, memadu menyusun rencana usaha tani, penyusunan program penyuluhan pertanian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aparatur petugas lapangan hortikultura mempunyai fungsi:

a. Petugas melaksanakan tugas sebagai inisiator, yang senantiasa selalu memberikan gagasan/ide-ide baru.
b. Petugas melaksanakan tugas sebagai fasilitator yang senantiasa memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan, baik dalam proses belajar mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan usahataninya.
c. Petugas melaksanakan tugas sebagai motivator yang senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu.
d. Petugas melaksanakan tugas sebagai penghubung dan penyampai aspirasi masyarakat tani.

Berdasarkan uraian tugas aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dalam bidang holtikultura telah diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Hortikultura.

4.2 Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Kinerja aparatur memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja aparatur tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan Aparatur yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dapat terlaksana dengan baik apabila memperhatikan kinerja aparaturnya.

Kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat diukur maupun

diketahui sejauh mana kinerja aparatur Pemerintahan Bandung Barat melalui indikator kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunnikasi aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu yang terdiri dari aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

4.2.1 Kualitas Kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasrilangu

Kualitas kerja lembaga aparatur Negara sebagai abdi masyarakat harus selalu diupayakan untuk terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kualitas kerja merupakan kesesuaian antara hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan, sebagai totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Kualitas kerja merupakan dimensi pertama yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja aparatur dalam kualitas kerja terdapat tiga aspek yang peneliti gunakan untuk mengukur dimensi kualitas kerja yaitu aspek, *reliability* dan *power durability*. Kualitas kerja dan nilai hasil kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam Pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani waluh dapat dilihat dari aspek *reliability* dan *power durability*, berikut merupakan rincian penelitian mengenai aspek kualitas kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh.

4.2.1.1 Kehandalan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh

Reliability atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kehandalan, merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Akurasi pelayanan menyebutkan bahwa pelayanan dimaksud berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari kerusakan.

Ketepatan dalam pelayanan sangat diperlukan agar para masyarakat yakin bahwa apa yang ia peroleh sudah benar, baik dari aspek kelengkapan administratif maupun prosedur. Kehandalan merupakan kemampuan aparatur yang diharapkan dapat diandalkan dalam menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan tanggung jawab dan akurat kepada masyarakat.

Kehandalan apartur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan aparatur guna meningkatkan kesejaahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu. Kehandalan merupakan jaminan atas kesanggupan, atau kemampuan aparatur dalam hal memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat yaitu, kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, pemenuhan kebutuhan masyarakat semenjak awal dan setiap saat, melakukan sesuatu secara benar semenjak awal, dan sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan masyarakat selaku petani.

Kehandalan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang bertujuan untuk menciptakan kepuasan agar kualitas pelayanan sebagai penyedia jasa layanan tetap terjaga. Bila jasa yang diberikan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan

berorientasi pada pelaksanaan pelayanan yang baik maka faktor kehandalan akan tumbuh dengan sendirinya.

Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, kehandalan yang ditunjukan aparatur diwujudkan dalam bentuk proses pelayanan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku dan sesuai dengan aturan administratif.

Aparatur BP3K Kecamatan Cisarua dituntut untuk memiliki kehandalan dalam memberikan pelayanan kegiatan penyuluhan dan pendampingan baik secara teori maupun praktek. Kehandalan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua saat ini cukup baik dalam segi praktek meskipun dalam segi teori. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparatur BP3K Kecamatan Cisarua menyatakan sebagai berikut:

> "Sejauh ini kemampuan aparatur penyuluh dapat disimpulkan 90% mampu menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh para petani, meskipun terkadang ada permasalahan yang sulit di antisipasi"
> (27/08/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa kemampuan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai kegiatan pemberian bantuan dan penyuluhan guna meningkatkan kesejahteraan petani dapat dikatakan sudah optimal dalam bentuk pemberian bantuan sarana dan prasarana, maupun bantuan infomrasi, meskipun sesekali aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengalami kesulitan dalam mengolah data ataupun menganalisa masalah yang terjadi terhadap masyarakat selaku petani waluh di Desa Pasirlangu. Kesulitan lain yang di hadapi aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu dalam pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, karena sering terjadi permasalahan

petani waluh Desa Pasirlangu salah satunya yaitu tanaman hasil panen tidak terjual secara keseluruhan, hal tersebut yang membuat petani sering mengalami kerugian.

Permasalahan tersebut dapat diakibatkan hasil panen yang tidak terjual, peristiwa tersebut timbul karena penuhnya produk dipasaran sehingga produk yang dihasilan petani tidak dapat diterima keseluruhan oelh pasar. Petani membutuhkan adanya kehandalan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk menangani permasalahan tersebut dengan cara mengolah data dalam pemasaran, salah satunya dengan cara melihat pasar yang membutuhkan produk sehingga permasalahaa tersebut teratasi dengan baik. Permasalahan tersebut dialami oleh salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu:

> "Ketika kita melakukan panen, kita jual ke bandar kadang hasil panennya tidak terjual semua karena ada batas kuota dari Bandar, jadi kita harus menunggu dari nunggu itu yang buat kualitas produk nya menurun dan harganya pun menurun"
> (20/07/2018)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh salah satu petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu, bahwa ada permasalahan yang selalu dirasakan petani dalam hal pendapatan, tingginya pengeluaran petani dan rendahnya pendapatan petani waluh yang didapatkan, serta hasil produksi panen yang tinggi dan sedikitnya permintaan pasar yang membuat permasalahan tersebut terjadi. Aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sudah berusaha untuk meminimalisir permasalahan tersebut, namun tingkat kehandalan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat baik aparatur dinas maupun aparatur tingkat kecamatan yang belum optimal untuk mengatasi masalah petani yang membuat hambatan

khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kehandalan dalam kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu baik aparatur dinas maupun aparatur kecamatan dapat dikatakan belum optimal dalam pelaksanaannya untuk mengatasi permasalahan yang dialami petani waluh di Desa Pasirlangu, karena kemampuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam mengolah data untuk pemasaran produk belum optimal yang menyebabkan petani Waluh di Desa Pasirlangu masih merasakan adanya permasalahan yang belum teratasi penuh oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Petani waluh di Desa Pasirlangu selalu merasakan kesulitan ketika mereka melakukan panen, kesulitan yang mereka alami yaitu mereka selalu kebingungan jika hasil panen yang mereka dapatkan tidak terjual secara keseluruhan produknya, masih terdapat produk yang belum terjual pada hari panen, hasl tersebut yang membuat produk terjual di hari selanjutnya, yang mengakibatkan harga daya jual menurun dikarenakan kualitas produk yang juga ikut menurun.

Aparatur Pemerintahan diharapkan dapat mengerti dan menyusun strategi terutama untuk pemasaran prdouk holtikultura khususnya waluh yang menjadi permasalahan bagi petani di Desa Pasirlangu. Aparatur Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh petani waluh di Desa Pasirlangu dalam meminimalisirkan

permasalahan teresbut, agar petani waluh di Desa Pasirlangu tidak selalu mengalami hambatan maupun permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kehandalan dalam kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu baik aparatur dinas maupun aparatur kecamatan dapat dikatakan belum optimal dalam pelaksanaannya untuk mengatasi permasalahan yang dialami petani waluh di Desa Pasirlangu, karena kemampuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam mengolah data untuk pemasaran produk belum optimal yang menyebabkan petani Waluh di Desa Pasirlangu masih merasakan adanya permasalahan yang belum teratasi penuh oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

4.2.1.2 Kekuatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh

Power Durability dalam bahasa Indonesia yaitu kekuatan, kekuatan merupakan sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, sehingga pelaksanaan kegiatan kerja aparatur dapat dilaksanakan dengan siap dan efisien.

Kekuatan yang harus dimiliki oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah kesigapan, dan ketegasan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, sedangkan kekuatan yang harus dimiliki oleh aparatur

Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah kesigapan petugas dalam melayani masyarakat selaku petani, kekuatan dalam hal daya fikir dan juga memberikan jaminan terhadap kebutuhan yang dibutuhkan petani salah satunya petani waluh di Desa Pasirlangu.

Aparatur pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdir dari aparatur dinas dan aparatur kecamatan dituntut tidak pandang bulu dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu kekuatan fisik petugas dalam sebuah pelaksanaan kinerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting, sebenarnya tidak ada ketetapan yang mengartur soal kekuatan fisik petugas, akan tetapi ketika bertugas petugas harus dipastikan berada dalam keadaan sehat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan terdapat beberapa ketanggapan aparatur Kecamatan Cisarua dalam kegiatan upaya meningkatkan kualitas layanan dan menyelesaikan permasalahan mengenai petani dilakukan dengan melihat kerelaan aparatur dalam menangani masalah yang terjadi di dilapangan khususnya petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu, mengukur dan menilai kesigapan dan respon masyarakat selaku petani mengenai kinerja aparatur dalam menangani masalah yang dirasakan para petani untuk menciptakan suatu pelayanan yang baik yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan mengukur responsivitas suatu pelayanan aparatur petugas Kecamatan Cisarau di harapkan petani akan menerima pelayanan yang baik dari aparatur sesuai dengan tujuan yang telah di buat oleh aparatur Pemerintahan

Kabupaten Bandung Barat dengan berlangsungnya kegiatan yang dlaksanakan oleh aparatur petugas lapangan dengan tujuan untuk kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur DPKP Kecamatan Cisarua mengenai kesigapan aparatur dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut: “Kami sebagai kooridnator untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada petani, jadi kami selalu menerima apa keluhan petani yang disalurkan ke petugas kecamatan yang kemudian datangnya laporan kepada kami” (27/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat mengenai kesigapan tergantung bagaimana kondisi dari aparatur Kecamatan yang berkegiatan langsung dengan petani, segala apa keluhan dan permasalahan yang ada dirasakan petani akan ditanggapi oleh aparatur Kecamatan yang selanjutnya di tindaklanjuti dengan aparatur DPKP untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai kesigapan dan kerelaan aparatur dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu sebagai berikut: “Mengenai kerelaan sepanjang ini memang itu merupakan tugas, pokok, dan fungsi kami, kami harus melaksanakan kegiatan dengan senang hati. (04/01/2018)

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai kerelaan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu peneliti dapat

menjelaskan bahwa aparatur BP3K Kecamatan Cisarua bekerja sesuai dengan tanggung jawab karena untuk menghindari dan meminimalisir adanya permasalahan yang dialami oleh masyarakat selaku petani, sehingga permasalahan para petani dapat ditangani dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan gunan menunjang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

Pendapat lain dikemukakan oleh salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu mengenai kerelaan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh aparatur BP3K Kecamatan Cisarua yaitu sebagai berikut:

> "Ya kami rasa mereka cukup semangat menjalani tugas mereka dalam kegiatan penyuluhan atau pendampingan ini dengan datang kelapangan, menanyakan bagaimana hasil dari pemberian inovasi baru, apakah ada perubahan baik atau buruk yang terjadi.
> (10/07/2018)

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menjelaskan mengenai kerelaan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua khususnya kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna menunjang peningkatan kesejahteraan petani, petugas sangat rela membantu masyarakat dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada petani walaupun terkadang kegiatan peningkatan kesejahteraan petani yang dilakukan dilapangan jarak yang di tempuh petugas sangat jauh tapi petugas rela menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan.

Berdasaran uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa *power durability* kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua dalam

pelaksanaannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan pernyataan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, bahwa kesigapan aparatur sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur masing-masing, dan sudah dijalankan sesuai dengan kemampuan aparatur tersebut.

Petani waluh Desa Pasirlangu dalam kesigapan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan kegiatan guna menunjang peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu meenyatakan bahwa aparatur BP3K sudah menjalani tugasnya dengan baik, meskipun masih ada keluhan petani yang belum teratasi oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasaran uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekuatan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua dalam pelaksanaannya kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan cukup baik sesuai dengan pernyataan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, bahwa kesigapan aparatur sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur masing-masing, dan sudah dijalankan sesuai dengan kemampuan aparatur tersebut.

4.2.2 Ketepatan Waktu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang peningkatan kesejahteraan petani Waluh

Ketepatan waktu aparatur merupakan hitungan atau serangkaian ketika proses dilakukan, atau merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Ketepatan waktu dalam hal ini menguraikan serangkaian waktu yang terdiri dari jadwal kerja aparatur dan lama penyelesaian kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Jadwal kerja dirasa sangat penting karena jika aparatur melaksanakan jadwal kerja denan baik maka penilaian kinerja aparatur akan dinilai optimal begitupun dengan lama penyelesaian kerja aparatur, sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

4.2.2.1 Jadwal Kerja dalam Ketepatan Waktu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang kesejahteraan petani

Jadwal kerja merupakan susunan atau program yang telah dirancang dan diberlakukan bagi semua aparatur yang bekerja dan menjadi sebuah peraturan. Jadwal kerja yang sudah menjadi peraturan dalam bekerja bagi aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat harus dijalankan dengan tertib agar dapat terwujudnya tujuan organisasai dengan bersama.

Analisa kekrja menaruh perhatian bagaimana suatu macam pekerjaan akan terselesaikan, dalam pengaplikasian prinsip dan teknik pengukuran cara kerja yang optimal dalam sistem kerja akan memberikan suatu alternatif metode

pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan efisien. Suatu pelaksanaan kerja dapat dikatakan efisien apabila waktu penyelesaian berlangsung dengan singkat dan tepat tanpa adanya kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat mengenai jadwal kerja aparatur sebagai berikut:

> "Jadwal kerja kami yaitu dari hari senin hingga hari jum'at, untuk pelayanan aparatur hanya melayani dari hari senin hingga hari kamis, untuk jamnya kami bekerja dari jam delapan pagi hingga jam empat sore, sejauh ini kami menigkuti peraturan atau jadwal kerja yang sudah ditetapkan" (27/07/2108)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat tersebut mengenai jadwal kerja aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat bahwa mereka sudah mengikuti dan melaksanakan peraturan jadwal kerja yang sudah ditetapkan, namun berbeda dengan keadaan dan kondisi yang peneiliti alami ketika peneliti mengunjungi kantor DPKP Kabupaten Bandung Barat bahwa pada kenyataannya aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat sering tidak ada dikantor dalam jadwal kerja yang sudah ditentukan hal tersebut tidak ada keterangan dengan ketidakhadirannya para aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat saat jam kerja berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatu BP3K Kecamatan Cisarua mengenai jadwal kerja dalam ketepatan waktu yaitu sebagai berikut:

> "Jadwal kerja aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sama dengan jadwal kerja aparatur Kabupaten, pada dasarnya jadwal kerja aparatur sama baik di kecamatan maupun di kabupaten, atau di daerah lainnya dan kami melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan ." (27/07/2018).

Berdasarkan hasil wawancara peneiliti dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai jadwal kerja dalam ketepatan waktu yaitu aparatur menyatakan bahwa pelaksanaan jadwal kerja aparatur sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, namun pada kenyataannya tidak jauh bereda dengan keadaan aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat bahwa aparatur selalu tidak ada dalam kantor ketika jam kerja dengan tanpa keterangan.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam ketepatan kerja mengenai jadwal kerja tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mengakibatkan kinerja maupun kegiatan tidak berjalan dengan efisien salah satunya kegiatan penyuluhan dan pendampingan khususnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu berikut hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

> “untuk jadwal kerja petugas pemerintah yang kami tau ya dari hari senin sampai hari jum’at, kami tidak mengetahui apakah jadwal tersebut berjalan atau tidak, tapi pada kenyataannya banyak terjadi petugas pemerintah sering berkeliaran diwaktu jam kerja”
> (20/07/2108)

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh petani waluh Desa Pasirlangu mengenai jadwal kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat bahwa jadwal kerja aparatur tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Pernyataan tersebut selaras dengan keadaan yang peneliti alami ketika peneiliti melakukan observasi kepada aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Padalarang.

Jadwal kerja aparatur tidak hanya dilaksanakan di wilayah kantor akan tetapi untuk aparatur BP3K mereka memliki jadwal kerja yaitu pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dengan petani guna untuk meningkatakan kesejahteraan petani, khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu. Berikut pernyataan yang dinyatakan oleh salah satu aparatur BP3K Kecamatan Cisarua yang melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani sebagai berikut:

> "Jadwal kegiatan penyuluhan bagi aparatur penyuluh itu dilakukan dalam waktu satu minggu satu kali yaitu kepada satu kelompok tani, saya bertugas untuk melaksanakan penyuluhan ke 3 Desa, dan dalam satu desa itu terdapat 10 kelompok tani, jadi saya melaksanakan penyuluhan satu minggu satu kali dengan kelompok tani yang berbeda di daerah yang berbeda"
> (27/07/2108)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut aparatur menyatakan bahwa jadwal kegiatan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dilaksanakan dalam waktu satu minggu satu kali kepada satu kelompok tani yang berbeda di daerah yang berbeda.

Jumlah waktu tersebut memiliki sedikit permasalahan bagi aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sebagai pelaksana petugas lapangan untuk kegiatan pemberian bantuan, penyuluhan dan pendampingan guna menunjang peningkatan kesejahteraan petani waluh. Aparatur petugas lapangan tidak dapat melaksanakan kegiatan mengenai peningkatan kesejahteraan petani dengan efektif karena keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur yang tidak mencukupi dengan waktu yang singkat. Hal tersebut menyebabkan bantuan maupun kegiatan penyuluhan tidak diberikan secara merata dikarenakan keterbatasan sumberdaya aparatur yang

membuat aparatur petugas lapangan harus memproritaskan yang mana mestinya di prioritaskan terhadap kelompok tani yang ada di Desa Pasirlangu.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan sementara bahwa jadwal kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan dikantor tidak berjalan dengan efektif, hal tersebut masih ada aparatur yang tidak mentaati peraturan jadwal kerja baik aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat maupun aparatur BP3K Kecamatan Cisarua, jadwal kerja yang tidak berjalan dengan efektif akan mengakibatkan kualitas kerja aparatur tidak optimal.

Jadwal kerja aparatur petugas lapangan BP3K Kecamatan Cisarua dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumberdaya aparatur, kegiatan pemberian bantuan, penyuluhan, dan pendampingan diberikan tidak dengan jadwal, karena aparatur penyuluh pertanian tidak membuat jadwal untuk kegiatan penyuluhan dan pendampingan, hal tersebut dikarenakan aparatur penyuluh pertanian akan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan, penyuluhan dan pendampingan dengan skala prioritas, hal tersebut yang membuat petani waluh di Desa Pasirlangu tidak mendapatkan bantuan penyuluhan dan pendampingan yang disebabkan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa jadwal pemberian bantuan, penyuluhan, dan pendampingan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu dapat terhitung dalam waktu satu bulan satu kali, hak tersebut tidak terlaksana secara berkala karena keterbatasan sumberdaya aparatur penyuluh pertanian kegiatan pemberian bantuan, penyuluhan, dan pendampingan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu terkadang berjalan dalam waktu 3 bulan sekali.

4.2.2.2 Lama Penyelesaian dalam Ketepatan Waktu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang Kesejahteraan Petani Waluh

Lama penyelesaian dalam ketepatan waktu merupakan salah satu syarat agar suatu informasi dapat bermanfaat, ketika informasi disajikan terlambat maka nilai yang terkandung tidak menjadi relevan lagi dengan keadaan yang ada begitu pula dengan laporan kegiatan yang disampaikan kepada organisasi.

Lama penyelesaian dalam penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penundaan yang menyebabkan penumpukan volume pekerjaan dapat dihindari. Lama penyelesaian pekerjaan harus ditetapkan sehingga petugas dapat mengetahui batas waktu penyelesaian pekerjaannya dan dapat membuat target.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat memiliki ketentuan mengenai lama penyelesaian pekerjaan dalam kegiatan pemberian bantuan , seperti yang dikatakan oleh aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, lama penyelesaian pemberian bantuan dilakukan pertahun, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

> “pemberian bantuan sarana dan prasarana seperti pupuk dan pestisida itu diberikan dari dinas pertahun, jadi kami dari BP3K menampung apa kebutuhan petani yang kemudian kami laporkan ke dinas yang selanjutnya akan dilakukan pemberian bantuan dari dinas melewati kami”
> (25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut aparatur BP3K Kecamatan Cisarua menyatakan bahwa lama penyelesaian pemberian bantuan akan diberikan dalam tempo satu tahun sekali, bantuan tersebut tidak akan langsung diberikan kepada

petani, melainkan aparatur harus memprioritaskan kelompok petani mana saja yang membutuhkan bantuan dan yang akan diberi bantuan.

Pernyataan aparatur penyuluh pertanian sesuai dengan apa yang petani rasakan, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu mengenai lama penyelesaian dalam ketepatan waktu sebagai berikut:

> "bantuan dari pemerintahan seperti bantuan pupuk, bantuan pestisida, dan bantuan pengetahuan itu jarang kami rasakan karena mereka selalu memilih mana yang mesti di prioritaskan, dan kelompok tani kami selalu kurang diperhatikan"
>
> (25/07/2018)

Berdasarkan pernyataan dari salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu bahwa lama penyelesaian pemberian bantuan tidak selalu diberikan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu, hal tersebut menyebabkan petani waluh di Desa Pasirlangu selalu mengalami permasalahan.

Lama Penyelesaian kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan oleh aparatur penyuluh pertanian kepada petani waluh di Desa Pasirlangu kegiatan tersebut berlangsung dalam waktu kurang lebih dua jam, namun kegiatan tidak selalu diberikan kepada petani walulh di Desa Pasirlangu, sedangkan waktu penyelesaian yang dilakukan oleh aparatur penyuluhan kepada setiap kelompok tani dilaksanakan setiap satu minggu sekali.

Gambar 4.2
Kegiatan Sosialisasi Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat



(Sumber: BP3K, 2108)

Berdasarkan gambar 4.2 diatas aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan sosialisasi yang terdiri dari aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua melakukan sosialisai antara aparatur demi pencapaian target peningkatan kesejahteraan petani, lama penyelesaian kegiatan tersebut dilaksanakan guna menyusun rencana dan mempersiapkan kemampuan yang selanjutnya akan disampaikan kepada petani guna meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu.

Lama Penyelesaian kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yang terdiri dari aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua, dalam kegiatan sosialisai antara aparatur terhitung dalam waktu satu minggu sekali terkadang terlaksana satu bulan satu kali, hal

tersebut tidak menentu karena bagaimana kondisi aparatur mengenai pekerjaannya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas lama penyelesaian kera aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak mengalami kendala mengenai waktu yang dibutuhkan, hal tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan dengan petani, dan kegiatan sosialisai antara aparatur, namun dalam lama penyelesaian yang dilaksanakan belum menghasilkan kualitas petani yang berpotensi, hal tersebut dikarenakan bukan permasalahan dari lama penyelesaian, akan tetapi selalu berbenturan kembali dengan keterbatasan sumberdaya aparatur yang bertugas sebagai aparatur penyuluh pertanian.

Lama penyelesaian yang dibutuhkan aparatur mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dalamm keadaan keterbatasan jumlah aparatur penyuluh pertanian yang tidak memadai akan membuat lama penyelesaian jangka panjang, hal tersebut mengikuti bagaimana keadaan sumberdaya aparatur khususnya aparatur penyluh pertanian yang melaksanakan kegiatan dengan petani dalam kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani.

Aparatur penyuluh pertanian membutuhkan penambahan sumberdaya, hal tersebut yang akan membuat lama penyelesaian aaratur mengenai peningkatan kesejahteraan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu berlangsung

optimal, yang akan membuat petani waluh di Desa Pasirlangu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menciptakan petani yang berpotensi tinggi dan yang utama untuk memenuhi kebutuhan dan meminimalisir keluhan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu.

4.2.3 Inisiatif Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani

Inisiatif dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencari kemudahkan dan kecepatan dalam pelaksanaan kerja untuk mencari cara kerja yang paling mudah dan paling cepat. Inisiatif ditandai dengan memiliki rasa ingin bisa, rasa ingin tahu, lebih mudah, lebih cepat, kepedulian.

Inisiatif merupakan kesesuaian antara aktivitas yang dilakuakn dengan wewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan. Inisiatif merupakan salah satu dimensi penting dalam Kinerja, karena dengan adanya inisiatif dari para petugas maka akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Dalam dimensi insisiatif, terdapat tiga aspek utama yang dapat mengukur inisiatif aparatur pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan, aspek tersebut antara lain adalah, aspek kepedulian dan tanggung jawab, yang peneliti uraikan sebagai berikut.

4.2.3.1 Kepedulian dalam Inisiatif Kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kepedulian memiliki makna yang beragam, banyak literatur yang menggolongkannya berdasarkan orang yan peduli, orang yang dipedulikan dan sebagainya. Kepedulian menyangkut tugas, peran, dan hubungan, yang menjadikan diri terkait dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap masyarakat selaku petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu.

Kepedulian salah satu aspek penting dalam dimensi inisiatif Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu. Melalui aspek kepedulian, akan dapat terlihat sejauh mana kepedulian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terhadap pekerjaannya dan juga kepedulian aparatur BP3K terhadap petani waluh di Desa Pasirlangu. Kepedulian terhadap keakuratan tujuan adalah dorongan untuk mengurangi ketidak pastian dalam suatu lingkungan. Hal ini tampak dalam bentuk pemantauan dan pemeriksaan pekerjaan dan menekankan pada kejelasan peran.

Mengenai kepedulian Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu, kepedulian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terhadap pekerjaannya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparatur penyuluh pertanian sebagai berikut:

> “Kami rasa tingkat kepedulian kami dengan petani sudah cukup kami berikan, dengan adanya kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan itu salah satu bentuk kepedulian kami kepada petani maupun kelompok tani”
> (25/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut aparatur BP3K Kecamatan Cisarua menyatakan bahwa kepedulian yang diberikan aparatur penyuluh pertanian sudah dilakukan dengan baik, bentuk kepedulian aparatur dijalankan dengan adana kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, namun hal tersebut tidak selaras dengan pernyataan dari salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu, sebagai berikut:

> “perhatian atau kepedulian pemerintah kepada kami dirasa kurang, kami merasa tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah karena adanya skala prioritas yang membuat pemerintah tidak terlalu memerhatikan kami, padahal disisi lain kami juga butuh perhatian dari pemerintah”
> (20/07/2018)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu bahwa kepedulian aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku aparatur penyuluh pertanian kurang memperhatikan petani waluh di Desa Pasirlangu, hal tersebut yang membuat petani waluh di Desa Pasirlangu tidak dapat berkembang untuk kesejahteraan petaninya.

Prilaku aparatur dalam melayani masyarakat merupakan bukti dari suatu pelayanan yang diberikan aparatur negara kepada masyarakat sebagai wujud pemberian perhatian. Konsultasi langsung dapat dilakukan oleh para petani ketika mengalami berbagai kendala dalam proses mengurus tanaman. Seperti yang disampaikan oleh aparatur penyuluh pertaninan,

> “Kalau ada petani yang mengalami kendala atau masalah dalam proses menanam biasanya aparatur akan memberikan pengetaahuan atau solusi dengan mempraktekannya secara langsung, jika masalah tersebut tidak bisa kami atasi kami berdiskusi dengan aparatur lainnya” (30/072018).

Berdasarkan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa aparatur BP3K Kecamatan Cisarua melakukan proses empati penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat selaku petani. Proses tersebut dirasa penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepedulian yang diberikan kepada petani, sehingga petani merasa dilayani secara tulus. Berikut hasil wawancara penilit dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu yaitu sebagai berikut:

> “Perhatian aparatur dengan kelompok tani waluh dirasa kurang, karena mereka kebanyakan urusan dengan kelompok tani lain yang harus mereka prioritaskan”.
> (29/07/2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa kepedulian aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu dirasa kurang, hal tersebut dapat diakibatkan dengan adanya keterbatasaan sumberdaya aparatur yang membuat aparatur harus memilih mana yang harus menjadi prioritas.

Proses konsultasi secara pribadi juga merupakan salah satu cara agar petani mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam proses menanam maupun paska panen. Hal tersebut juga akan dapat meningkatkan penilaian positif dari masyarakat selaku petani kepada aparatur pelaksana kegiatan DPKP Kabupaten Bandung Barat yang secara tidak langsung akan berdampak pada kepercayaan petani untuk mempercayai kinerja dari aparatur

DPKP Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa bentuk kepedulian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya kepada petani waluh Desa Pasirlangu dirasa kurang baik karena ada ketidak sesuaian antara pernyataan aparatur dengan pernyataan petani waluh yang merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Kepedulian Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kepada petani waluh di Desa Pasirlangu kurang baik, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya aparatur penyuluh pertanian yang membuat aparatur harus memprioritaskan kelompok tani yang menurutnya harus di prioritaskan, namun pada kenyataannya petani waluh di Desa Pasirlangu membutuhkan peran Pemerintahan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Proses konsultasi secara pribadi juga merupakan salah satu cara agar petani mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam proses menanam maupun paska panen. Hal tersebut juga akan dapat meningkatkan penilaian positif dari masyarakat selaku petani kepada aparatur pelaksana kegiatan DPKP Kabupaten Bandung Barat yang secara tidak langsung akan berdampak pada kepercayaan petani untuk mempercayai kinerja dari aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa bentuk kepedulian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya kepada petani waluh Desa Pasirlangu dirasa kurang baik karena ada ketidak sesuaian antara pernyataan aparatur dengan pernyataan petani waluh yang merupakan kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan.

4.2.3.2 Tanggung Jawab dalam Inisiatif Kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban selaku aparatur dalam melaksanakan tugas yang sudah ditentukan.

Tanggung Jawab merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi insiatif, berhasil atau tidaknya kinerja pegawai dapat diukur dari tingkat tanggung jawab yang dimiliki pegawai atau petugas terhadap pekerjaannya. Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan petani, maupun dalam pemberian bantuan kepada petani tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab tehadap pekerjaan maupun tanggungjawab moral terhadap masyarakat selaku petani.

Mengenai tanggungjawab petugas dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani,

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya aparatur BP3K yang berhubungan langsung dengan petani waluh di Desa Pasrilangu bertanggung jawab pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Salah satu bentuk tanggung jawabnya yaitu melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan melayani masyarakat.

Aparatur BP3K Kecamatan Cisarua sangat dituntut bertanggung jawab terhadap kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu:

> "meningkatkan kesejahteraan petani salah satu cita-cita kami sebagai petugas, yang kami lakukan dengan kegiatan pemberian bantuan atau penyuluhan, sejauh ini tanggung jawab yang kami berikan sesuai dengan keadaan sumberdaya aparatur penyuluh"
> (27/08/2108)

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua menyatakan bahwa tanggung jawab yang mereka berikan kepada petani sudah sesuai dengan kemampuan dan keadaan sumberdaya aparatur penyuluh, jika dalam kenyataannya petani masih merasakan kesulitan dan memerlukan bantuan hal tersebut bukan disebabkan oleh tanggungjawab yang tidaka dilaksanakan, akan tetapi keterbatasan sumberdaya aparatur penyuluh pertanian yang menyebabkan tanggung jawab aparatur terlihat kurang maksimal.

Jaminan dan kepastian suatu tanggungjawab yang dapat terlaksana dengan baik jika kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur sesuai dengan

tugas dan pekerjaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua khususnya mengenai kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan dengan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu mengenai jaminan aparatur mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani yaitu sebagai berikut:

> "Untuk jaminan selalu ada contohnya, kami membuat grup *chat* dengan setiak kelompok tani untuk menyalurkan informasi masalah ataupun aspirasi dari petani yang langsung ditanggapi oleh aparatur.
> (30/07/18)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur petugas lapangan khususnya kegiatan di wilayah Desa Pasirlangu maka dapat di jelaskan mengenai jaminan dari program tersebut bahwa Aparatur petugas lapangan memberikan jaminan kepada petani berupa tanggapan langsung dari aparatur petugas lapangan terhadap informasi, permasalahan maupun aspirasi dari petani. Pernyataan tersebut tidak selaras dengan salah satu pernyataan petani waluh Desa Pasirlangu, berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani Waluh Desa Pasirlangu:

Berdasarkan uraian diatas bahwa jaminan dalam kualitas layanan aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan baik karena dengan adanya sarana media tempat untuk bertukar pikiran maupun informasi antara aparatur dengan petani yang dapat memudahkan berjalannya komunikasi yang baik khususnya petani waluh Desa Pasirlangu.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melaksanakan tanggungjawab yang baik dengan adanya sarana media salah satu tempat untuk

berkomunikasi antara aparatur penyuluh pertanian dengan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu, meskipun demikian tanggapan dari aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dirasa kurang menanggapi keluhan para petani, hal tersebut selalu berbenturan dengan keterbatasan sumberdaya aparatur. Aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua yang memegang tigas kelompok desa menjadi hambatan aparatur dalam menanggapi keluhan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu.

Jaminan dan kepastian suatu tanggungjawab yang dapat terlaksana dengan baik jika kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua khususnya mengenai kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan dengan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu mengenai jaminan aparatur mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tanggungjawab dalam inisiatif kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan baik karena dengan adanya sarana media tempat untuk bertukar pikiran maupun informasi antara aparatur dengan petani yang dapat memudahkan berjalannya komunikasi yang baik khususnya petani waluh Desa Pasirlangu.

Tanggungjawab apartur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terhadap kewajibannya mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, hal tersebut sebagai acuan aparatur

untuk mencapai tujuan bersama khusunya dalam peningkatan kesejahteraan petani. Aparatur penyuluh pertanian yang paling bertanggungjawab atas keluhan dan permasalahan yang dialami petani, karena petani akan selalu meminta bantuan kepada aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua yang selanjutnya akan dikoordinasikan dengan aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat untuk bersosialisasi mengenai peningkatan kesejahteraaan petani waluh di Desa Pasirlangu.

4.2.4 Kemampuan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kemampuan merupakan seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk menjalankan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kemampuan kerja merupakan kesanggupan petugas untuk melakukan pekerjaan secara konsepsional dan teknik operasiaonal. Kemampuan kerja dapat ditandai dengan pengetahunan dan sikap.

Kemampuan kerja sesuai keahlian pengetahuan dan sikap dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani guna menunjang peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu. Dimensi kemampuan kerja merupakan salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kinerja. Dimensi kemampuan kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat dikur oleh aspek pengetahuan dan sikap sebagai berikut:

4.2.3.1 Pengetahuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan Kebutuhan Petani Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh berdasarkan pengalaman langsung, atau diperoleh dengan belajar dengan proses pembelajaran secara khusus. Pengetahuan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dimensi kemampuan kerja. Seorang pegawai atau petugas harus memiliki pengetahuan yang luas khusunya yang berkenaan dengan pekerjaannya sehingga petugas tersebut dapat benar-benar memahami pekerjaannya dan dapat melaksakan pekerjaannya dengan tepat.

Pengetahuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengeneai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasrilangu, bahwa pengetahuan aparatur khususnya aparatur BP3K Kecamatan Cisarua selalu berusaha dipupuk dengan dilakukannya pembinaan dan pelatihan.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dituntut dalam pengetahuan baik pengetahuan sistem dalam bekerja maupun kemampuan mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian bantuaan penyuluhan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu. Pengetahuan aparatur dalam hal ini mengenai pengetahuan dalam permasalahan yang dihadapi petani waluh di Desa Pasirlangu salah satunya mengenai pemasaran.

Aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat khususnya bidang holtikultura meruapakan salah satu aparatur yang bertugas mengenai pemasaran petani khususnya pada seksi sarana dan pemasaran pertanian, aparatur dituntut untuk

mampu menganalisa dalam hal pemasaran, berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparatur seksi sarana dan pemasaran pertanian sebagai berikut:

> "Bicara soal pemasaran kami melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, seperti petani cabai yang kami temukan perusahan diluar negeri sehingga petani bisa melakukan ekspor kami melakukan dengan benar, namun untuk petani waluh sendiri memang kami tidak terlalu memperhatikannya" (27/07/2108)

Berdasarkan pernyataan aparatur seksi sarana dan pemasaran pertanian menyatakan bahwa petani waluh memang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut membuat petani waluh merasa tidak merupakan tugas dari pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Petani waluh seharusnya mendapatkan bantuan insetif sama seperti petani pada umumnya namun pemerintah tidak terlalu memperhatikannya.

Pengetahuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tidak terlalu berdampak kepada petani waluh di Desa Pasirlangu, salah satunya dalam hal pemasaran yang selalu dialami oleh petani waluh di Desa Pasirlangu, pemasaran yang dialami oleh petani waluh di Desa Pasirlangu yaitu hasli produk yang mereka panen tidak selalu terjual dengan sepenuhnya, hal tersebut karena pasar membatasi produk yang akan dijual kepada mereka, permasalahan tersebut yang membuat hasil pendapatan dengan pengeluaran tidak sesuai. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu, sebagai berikut:

> “pemerintah tidak terlalu turun tangan mengenai pemasaran karena mereka taunya kami sebagai petani menjual hasil panen kepada Bandar, yang selanjutnya dari Bandar menuju pasar, sedangkan hasil panen kami sendiri tidak diterima semua oleh Bandar karen ada batasannya, itu yang membuat pendapatan kami tidak memuaskan”
>
> (25/07/2018)

Berdasarkan pernyataan oleh salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu mengenai pemasaran yang selalu menjadi masalah, hal tersebut yang menyebabkan pendapatan petani tidak sesuai dengan pengeluaran petani yang telah dilakukan, dalam hal ini pemerintah tidak terlalu memperhatikan keberadaan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Peneliti melakukan wawancara dengan aparatur penyuluh pertanian yang menangani Desa Pasirlangu, berikut ialah pernyataan yang diberikan oleh salah satu aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua, sebagai berikut:

> “Saya sebagai aparatur yang memegang tigas desa, dan salah satunya yaitu Desa Pasirlangu, dalam satu desa terdapat kurang lebih ada 10 kelompok tani, jadi total wilayah yang saya tangani yaitu 30 kelompok tani, jadi jika masih ada keluhan maupun masalah petani yang belum kami selesaikan itu hal yang wajar karena keterbatasan sumberdaya aparatur yang menjadi penyebabnya”
>
> (27/07/2108)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua menyatakan bahwa salah satu penyebab keluha maupun permasalahan petani yang belum teratasi yaitu keterbatasan sumberdaya aparatur yang tidak memadai maupun mencukupi jumlah kelompok tani yang ada. Keterbatasan sumberdaya aparatur penyebab kurangnya perhatian pemerintah kepada petani waluh di Desa Pasirlangu khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Petani waluh di Desa Pasirlangu selalu merasakan kesulitan ketika mereka melakukan panen, kesulitan yang mereka alami yaitu mereka selalu kebingungan jika hasil panen yang mereka dapatkan tidak terjual secara keseluruhan produknya, masih terdapat produk yang belum terjual pada hari panen, hasl tersebut yang membuat produk terjual di hari selanjutnya, yang mengakibatkan harga daya jual menurun dikarenakan kualitas produk yang juga ikut menurun.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kehandalan dalam kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai kegiatan penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu baik aparatur dinas maupun aparatur kecamatan dapat dikatakan belum optimal dalam pelaksanaannya untuk mengatasi permasalahan yang dialami petani waluh di Desa Pasirlangu, karena kemampuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam mengolah data untuk pemasaran produk belum optimal yang menyebabkan petani Waluh di Desa Pasirlangu masih merasakan adanya permasalahan yang belum teratasi penuh oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Aparatur Pemerintahan diharapkan dapat mengerti dan menyusun strategi terutama untuk pemasaran prdouk holtikultura khususnya waluh yang menjadi permasalahan bagi petani di Desa Pasirlangu. Aparatur Pemerintahan sangat dibutuhkan oleh petani waluh di Desa Pasirlangu dalam meminimalisirkan permasalahan teresbut, agar petani waluh di Desa Pasirlangu tidak selalu mengalami hambatan maupun permasalahan.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti uraikan diatas bahwa pengetahuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung barat mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu sudah optimal dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan aparatur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, permasalahan maupun keluhan petani yang belum teratasi disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya aparatur yang bertugas melayani dan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, sehingga keluhan petani tidak dapat teratasi dengan keseluruhan, dalam hal ini petani waluh di Desa Pasirlangu menjadi petani yang sangat minim dalam perhatian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang mereka berikan.

4.2.3.2 Sikap Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan Kebutuhan Petani Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sikap merupakan keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Sikap merupakan salah satu aspek penting dalam dimensi kemampuan kerja. Sikap merupakan cerminan pribadi petugas dalam menjalankan pekerjaannya, baik buruknya sikap yang dilakukan oleh petugas dapat mempengaruhi persepsi dan rasa hormat masyarakat, sikap juga dapat menjadi salah satu faktor yang meyebabkan tercapai atau tidaknya hasil kerja yang maksimal.

Secara umum sikap merupakan perasaan, pikiran maupun perhatian , dan kecenderungan petugas yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-

aspek tertentu dalam lingkungannya. Komponen-komponen sikap yaitu pengetahuan, perasaan-perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak dalam penertiban. Dengan memahami atau mengetahui sikap individu, dapat diperkirakan respons ataupun perilaku yang akan diambil oleh individu yang bersangkutan.

Pemberian perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang dilakukan oleh aparatur kepada masyarakat dengan berupaya memahami keinginan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik khususnya pada pelayanan bantuan berupa sarana dan prasarana merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat guna tetap menjaga kenyamanan dan kekondusifan hubungan dari pihak aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan masyarakat selaku petani.

Prilaku aparatur dalam melayani masyarakat adalah bukti dari suatu pelayanan yang diberikan aparatur negara kepada masyarakat sebagai wujud pemberian perhatian. Konsultasi langsung dapat dilakukan oleh para petani ketika mengalami berbagai kendala dalam proses mengurus tanaman. Seperti yang disampaikan oleh salah satu aparatur penyuluh pertaninan Kecamatan Cisarua yaitu sebagai berikut:

> “Kalau ada petani yang mengalami kendala atau masalah dalam proses menanam biasanya aparatur akan memberikan pengetaahuan atau solusi dengan mempraktekannya secara langsung, jika masalah tersebut tidak bisa kami atasi kami berdiskusi dengan aparatur lainnya”
> (30/072018).

Berdasarkan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melakukan proses sikap penyelesaian

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat selaku petani. Proses tersebut dirasa penting untuk dilakukan sebagai bentuk perhatian yang diberikan kepada petani, sehingga petani merasa dilayani secara tulus. Sikap maupun perhatian yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat meskipun baik dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan namun hal tersebut tidak selalu dirasakan oleh petani waluh di Desa Pasirlangu. Berikut hasil wawancara peniliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu yaitu sebagai berikut:

"Perhatian aparatur dengan kelompok tani waluh dirasa kurang, karena mereka kebanyakan berurusan dengan kelompok tani lain yang harus mereka prioritaskan". (29/07/2018). Berdasarkan pernyataan tersebut dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu bahwa perhatian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kepada petani waluh di Desa Pasirlangu dirasa kurang, hal tersebut dapat diakibatkan dengan adanya keterbatasaan sumberdaya aparatur yang membuat aparatur harus memilih mana yang harus menjadi prioritas.

Sikap aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan kepada kelompk tani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu tidak berjalan dengan baik, keterbatasan sumberdaya aparatur yang menjadi penyebab hal tersbut tidak berjalan kepada petani waluh di Desa Pasirlangu.

Proses konsultasi secara pribadi juga merupakan salah satu cara agar petani mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam proses menanam maupun paska panen. Hal tersebut juga akan dapat meningkatkan

penilaian positif dari masyarakat selaku petani kepada aparatur pelaksana kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang secara tidak langsung akan berdampak pada kepercayaan petani untuk mempercayai kinerja dari aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat melakukan proses sikap penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat selaku petani. Proses tersebut dirasa penting untuk dilakukan sebagai bentuk perhatian yang diberikan kepada petani, sehingga petani merasa dilayani secara tulus. Sikap maupun perhatian yang dilakukan oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat meskipun baik dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan namun hal tersebut tidak selalu dirasakan oleh petani waluh di Desa Pasirlangu.

Petani waluh di Desa Pasirlangu merupakan petani yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut keluhan dan permasalahan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak dapat teratasi secara keseluruhan yang menjadikannya petani waluh di Desa Pasirlangu tidak dapat berkembang, dengan pengetahuan yang tidak memungkinkan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa bentuk sikap maupun perhatian aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kepada petani waluh Desa Pasirlangu mengenai pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dirasa kurang baik karena adanya keterbatasan sumberdaya aparatur yang menjadikannya kegiatan tidak berjalan dan tidak merata secara keseluruhan, yang membuat keluhan maupun permasalahan uang

dirasakan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak teratasi seccara keseluruhan, hal tersebut berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu bahwa keadaan kesejahteraannya rendah.

4.2.5 Komunikasi Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani waluh di Desa Pasirlangu

Komunikasi kerja merupakan hubungan kerja antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan untuk memudahkan proses kerja. Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak atau satu unit kerja tertentu saja, karena ada yang berkepentingan dengan keberadaan petani dan pengaruhnya terhadap kondisi.

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, karena antara aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pnangan Kabupaten Bandung Barat dan aparatur Balai Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan Kecamatan Cisarua harus berkerja sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Dalam mengukur dimensi komunikasi terdapat dua aspek penting yang dapat menjadi ukuran baik tidaknya komunikasi kerja yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan

petani waluh di Desa Pasirlangu. Ketiga Aspek tersebut antara lain adalah kerjasama dan hubungan kerja.

4.2.5.1Kerjasama Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi social antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Kejasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Setiap individu yang bekerja memiliki keterbatasan, maka dibutuhkanlah kerjasama dalam tim untuk dapat saling melengkapi sehingga tujuan dan hasil keinerja akan dapat dicapai.

Mengenai kerjasama aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat menjelaskan dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan, melakukan kerjasama antara aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat selaku petani waluh di Desa Pasirlangu.

Kerjasama aparatur DPKP Kabupaten dan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua dirasa cuku baik berikut hasil penelitian peneliti dengan salah satu aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat mengenai kerjasama sebagai berikut:

> "Kerjasama antara kami dengan Kecamatan itu memiliki kerjasama yang baik, kami memiliki hubungan yang baik pula, hal tersebut karena kami saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain terkait pertanian, bahkan jika diluar pekerjaan pun kami memiliki kerjasama yang baik". (25/07/2108)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat menyatakan bahwa kerjasama yang terjadi antara aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengalami kerjasama yang baik terkait pertanian maupun diluar pertanian, hal tersebut yang akan menyebabkan kerjasama dalam kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berjalan dengan optimal.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat upaya meningkatkan peningkatan kesejahteraan petani dapat berjalan dengan optimal dalam kerjasama yang baik dengan upaya bertukar informasi, saling membantu dan saling melengkapi antara aparatur dengan demikian untuk mencapai tujuan bersama dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu mengenai kerjasama aparatu Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut: "seperti yang saya ketahui bahwa kerjasama pemerintahan dirasa memiliki kerjasama yang baik".(27/07/2108). Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat bahwa kerjasama antara aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai peningkatan kesejahteraan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaannya.

Kerjasama aparatur bukan hanya dari kerjasama yang dilaksanakan dari kerjasama antara aparatur, namun adapun kerjasama yang dilakukan antara aparatur dengan masyarakat selaku petani guna menunjang kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, sebagai berikut ialah bentuk kerjasama aparatur dengan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Gambar 4.4
Bentuk Kerjasama Aparatur dengan Petani Waluh



(Sumber: Dokumen Peneliti, 2018)

Berdasarkan gambar 4.4 diatas merupakan bentuk kerjasama antara aparatur penyuluh pertanian dengan kelompok tani di Desa Pasirlangu dalam pembuatan pipa yang digunakan sebagai saluran air yang akan digunakan ketika petani mengalami kekeringan lahan dan kesusahan air, bentuk kerjasama antara aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua dapat dikatakan optimal dalam

hal ini aparatur menjalankan tugasnya dengan optimal dengan petani dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani waluh di Desa Pasirlangu dalam membantu meringankan beban petani.

Kerjasama aparatur bukan hanya dari kerjasama yang dilaksanakan dari kerjasama antara aparatur, namun adapun kerjasama yang dilakukan antara aparatur dengan masyarakat selaku petani guna menunjang kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, sebagai berikut ialah bentuk kerjasama aparatur dengan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Kerjasama aparatur penyuluh pertanian dengan kelompok tani di Desa Pasirlangu berjalan dengan baik, tanpa adanya permasalahan yang terjadi, petani waluh di Desa Pasirlangu sangatlah membutuhkan peran aparatur untuk ikut serta bekerja sama dengan petani waluh di Desa Pasirlangu guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, bentuk kerja sama aparatur yang dilaksanakan sudah optimal petani merasa adanya kerjasama yang baik yang diberikan oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat maupun aparatur BP3K Kecamatan Cisarua menjalankan kerjasama yang baik, salah satunya bentuk kerjasama bersama aparatur yaitu membuat alat penampung air untuk para petani, hal tersebut yang akan digunakan ketika musim panas dan kekeringan tanah mulai terjadi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kerjasama sama aparatur Pemerintahn Kabupaten Bandung Barat yaitu aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dan apratur BP3K Kecamatan Cisarua mengenai peningkatan kesejahteraan petani

dapat disimpulkan kerjasama aparatur yang sudah optimal. Bentuk kerjasama yang terjadi antara aparatur berjalan dengan baik sehingga kegiatan maupun tujuan dapat dicapai dengan mudah dan jelas. Bentuk kerjasama yang terjadi antara aparatur dengan petani berjalan dengan baik juga, sehingga aparatur dapat membantu petani dengan adanya kerjasama yang baik akan dengan mudah dalam mengatasi sebuah keluhan maupun permasalahan yang terjadi khususnya oleh petani waluh di Desa Pasirlangu.

4.2.5.1Hubungan Kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Hubungan Kerja merupakan bagaimana tata cara maupun aturan dalam bekerja sama. Hubungan kerja yang baik anatar pihak-pihak terkait tentu akan dapat menunjang keberhasilan kinerja. Hubungan kerja dapat disebut juga sebagai hubungan professional. Hubungan kerja antar petugas maupun dengan pihak lainnya terjalin dengan baik. masing-masing pihak mengerti tugas dan wewenangnya masing-masing dan juga menghormati tugas dan wewenang rekannya.

Hubungan kerja dengan pihak-pihak terkait berlangsung degan baik dan professional. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat bahwa hubungan kerjasama antar pihak pihak terkait dalam pelaksanaan penertiban parkir liar berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukan oleh pembagian tugas yang jelas dan berdasarkan prosedur.

Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai hububungan kerja yang dilaksanakan baik hubungan antara aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat maupun hubungan antara aparatur Pemerintahan dengan petani khusunya petani waluh di Desa Pasirlangu, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 4.5
Hubungan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat



(Sumber: BP3K, 2018)

Berdasarkan gambar 4.5 bahwa hubungan aparatur yang terjadi berjalan dengan baik, dengan adanya kegiatan aparatur penyuluh pertanian dapat meningkatkan hubungan yang baik dan terutama dapat meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan aparatur terkait pertanian, kegiatan tersebut dilaksanakan kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu sekali. Hubungan

aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua dalam kegiatan sosialisasi dapat membuat aparatur mengetahui informasi bertukar pendapat maupun pengetahuan.

Hubungan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak jauh berbeda dengan kerjasama aparatur yang dilaksanakan mengenai kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan kepada petani, hubungan hasil dari kerjasama, kerjasama yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik, begituun dengan keberhasilan dan tujuan bersama yang akan mudah untuk mewujudkannya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua, yaitu sebagai berikut:

> "Hubungan itu selalu berkaitan dengan kerjasama, jadi jika hubungan kita antara aparatur maupun hubungan dengan petani baik, maka kita dapat bekerjasama dengan baik, begitupun sebaliknya, jadi selama ini hubungan dari pihak aparatur maupun hubungan dengan petani dirasa baik-baik saja" (27/07/2108)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut salah satu aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua menyatakan bahwa hubungan mereka antara aparatur maupun hubungan dengan masyarakat selaku petani berjalan dengan baik, dengan adanya kerjasama yang baik selanjutnya akan terciptanya hubungan yang baik pula.

Hubungan aparatur dengan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan berjalan dengan baik berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu mengenai hubungan yang terjadi sebagai berikut:

> “petugas pemerintah dengan kelompok tani kami bisa dikatakan hubungannya berjalan dengan baik, meskipun tidak ada hubungan khusus seperti hubungan petugas pemerintah dengan petani cabai”
> (25/07/2108)

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu petani waluh di Desa Pasirlangu menyatakan bahwa hubungan antara aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua dengan petani waluh di Desa Pasirlangu berjalan dengan baik mesikpun tidak ada hubungan khusus yang diberikan, hal tersebut merupakan bentuk pemberian layanan dari aparatur kepada petaniwaluh di Desa Pasirlangu dan salah satu upaya acuan pelaksanaan kegiatan guna untuk menunjang peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Hubungan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dengan petani waluh di Desa Pasirlangu sangat diperlukan, dalam hal ini hubungan yang baik dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan akan terciptanya sebuah keberhasilan yang baik khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti uraikan dan analisa bahwa hubungan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari hubungan aparatur DPKP Kabupaten Bandung Barat dengan aparatur BP3K Kecamatan Cisarua berjalan dengan baik hal tersebut yang menyebabkan kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan berjalan dengan optimal. Hubungan aparatur penyuluh Kecamatan Cisarua dengan petani waluh di Desa Pasirlangu dirasa sangat penting demi terciptanya keberhasilan yang dirasakan oleh aparatur maupun petani waluh di Desa Pasirlangu.

Petani waluh di Desa Pasirlangu dengan adanya hubungan baik dengan aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua belum merasakan adanya tingkat keberhasilan bagi petani waluh di Desa Pasirlangu, hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan sumberdaya aparatur yang membuat petani waluh tidak menjadi perhatian khusus untuk aparatur penyuluh pertanian Kecamatan Cisarua, meskipun hubungan aparatur dengan petani waluh berjalan dengan baik namun hal tersebut tidak mempengaruhi kepada tingkat keadaan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.